

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 138 TAHUN 2019

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga perlu dilaksanakan asesmen penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan *Asesmen* Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP; dan
 - b. memberikan masukan terkait hasil asesmen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 1 (satu) kali kegiatan asesmen yang dilakukan pada bulan April Tahun 2019.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 138 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	: 1. Roni Dwi Susanto 2. Sarah Sadiqa	450.000 450.000
2	Ketua	: Jhon P H Situmorang	400.000
3	Anggota Area Manajemen Perubahan	: 1. Ari Sulindra 2. Yudi Prasetiawan	300.000 300.000
4	Anggota Area Penguatan Peraturan Perundang- Undangan	1. Yuyu Yulianti 2. Firmansyah	300.000 300.000
5	Anggota Area Penguatan Kelembagaan dan Organisasi	1. Ria Agustina Nasution 2. Festiana Niyanti	300.000 300.000
6	Anggota Area Penguatan Tata Laksana	1. Andy Martanto 2. Arif Budiman	300.000 300.000
7	Anggota Area Penguatan Sistem Manajemen SDM	1. Miftah Irfaniah 2. Vina Da'watul Aropah	300.000 300.000
8	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Resa Anggriani 2. Estu Retno Yulianti	300.000 300.000
9	Anggota Area Penguatan Pengawasan	1. R. Adha Pamekas 2. Wildan Massani	300.000 300.000
10	Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Sarah Arlina 2. Setiawan Rahandi Sabri	300.000 300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO